



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS SOSIAL

ꦩꦶꦏꦏꦠꦤ꧀ꦧꦠꦸꦭꦶꦱꦺꦴꦱꦶꦱꦶꦭ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta

Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022**

Nomor : 050/07189

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub. Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Sub.Kegiatan : Gaji, Target 14 kali

Latar Belakang

I. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM;
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota;

8. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

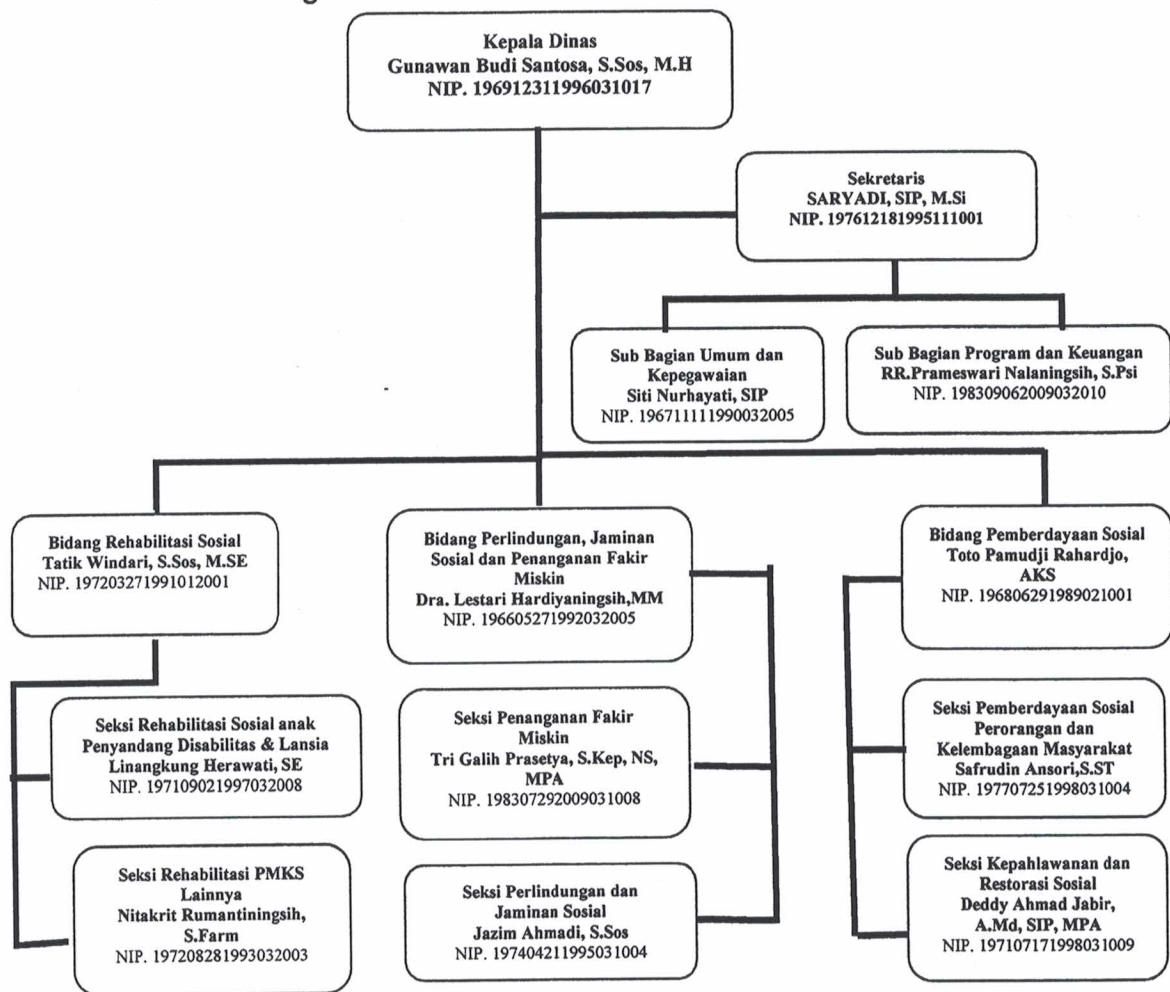
II. Gambaran Umum

Kegiatan ini mengakomodir pemberian gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan fungsional umum, tunjangan beras, tunjangan PPh/tunjangan khusus, pembulatan gaji, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja, iuran jaminan kematian, iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat, tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS selama satu tahun, yaitu untuk Tahun Anggaran 2022.

III. Data Pendukung

Data dukung untuk rencana kegiatan ini ada adalah :

- Sumber Pendanaan
- Sumber Daya Manusia
- Struktur Organisasi



IV. Tujuan Kegiatan:

Tujuan kegiatan pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah menyediakan dan memberikan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan fungsional umum, tunjangan beras, tunjangan PPh/tunjangan khusus, pembulatan gaji, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja, iuran jaminan kematian, iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat, tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

V. Gambaran Kegiatan yang akan dilaksanakan

- a) Metode Pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dilaksanakan secara swakelola.
- b) Tahapan Pelaksanaan Kegiatan:
 1. Persiapan
 2. Pelaksanaan
 3. Evaluasi dan Pelaporan
- c) Matrik pelaksanaan kegiatan:

URAIAN	B u l a n											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Persiapan	■	■										
Pelaksanaan Kegiatan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Evaluasi dan Pelaporan											■	■

VI. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan

- DPA

VII. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dilaksanakan selama 12 bulan dan bertempat di Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

VIII. Biaya yang dibutuhkan

Biaya yang dibutuhkan untuk Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah Rp. 4.439.058.908,- (Empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh delapan ribu sembilan ratus delapan rupiah).

IX. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.



Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

ꦩꦶꦏꦏꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022**

- Program** : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Indikator Program** : Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
- Kegiatan** : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Indikator Kegiatan** : Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan
- Sub.Kegiatan** : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

I. INDIKATOR SUB KEGIATAN

Menu Sub Kegiatan :

No	Indikator Sub Kegiatan	Target Ouput
1	Gaji	14 Kali

II. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana Anggaran Belanja untuk menu Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.812.891.318,-	1.812.891.318,-	0,-
2.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	143.006.510,-	153.006.510,-	10.000.000,-
3.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	133.000.000,-	148.070.000,-	15.070.000,-
4.	Belanja Tunjangan	56.840.000,-	56.840.000,-	0,-

	Fungsional PNS			
5.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	53.949.000,-	58.949.000,-	5.000.000,-
6.	Belanja Tunjangan Beras PNS	86.252.220,-	86.252.220,-	0,-
7.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	25.701.120,-	25.701.120,-	0,-
8.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	138.012,-	138.012,-	0,-
9.	Belanja iuran Jaminan Kesehatan PNS	163.808.375,-	163.808.375,-	0,-
10.	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.350.939,-	4.350.939,-	0,-
11.	Belanja iuran Jaminan Kematian PNS	13.052.817,-	13.052.817,-	0,-
12.	Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	20.476.047,-	20.476.047,-	0,-
13.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.895.522.550,-	1.895.522.550,-	0,-
	Jumlah	4.408.988.908,-	4.439.058.908,-	30.070.000,-

Total Rencana Anggaran Belanja Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2022 sebelum perubahan anggaran adalah sebesar Rp. 4.408.988.908,- (Empat miliar empat ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan rupiah).

Total Rencana Anggaran Belanja Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2022 setelah perubahan anggaran adalah sebesar Rp. 4.439.058.908,- (Empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh delapan ribu sembilan ratus delapan rupiah).

III. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.

Kepala,



Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

ꦩꦶꦏꦏꦺꦤ꧀ꦠꦸꦭꦶꦱꦺꦴꦱꦶꦱꦶꦭꦶꦁꦏꦺꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022**
Nomor : 050/07181

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Sub Kegiatan : Penggandaan Perencanaan dan Dokumen, Target 11.500 lembar

I. LATAR BELAKANG

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/Kota.
8. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

B. Gambaran Umum

Dinas Sosial Kabupaten Bantul adalah Perangkat Daerah yang mengusung Tematik Kemiskinan dan memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) dasar Wajib. Dinas Sosial Kabupaten Bantul mendukung IKU Bupati terkait Angka Kemiskinan dan Kriminalitas.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah Dinsos Kabupaten Bantul pengampu SPM pokok dasar wajib, mengusung tematik kemiskinan dimana kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul sebagian besar merupakan bagian dari adanya Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS), mitra kerja dalam menanggulangi kemiskinan dan korban bencana.

Dinsos Kabupaten Bantul menangani urusan sosial. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang banyak di kabupaten bantul membuat Dinas Sosial Kabupaten Bantul harus menyusun strategi perencanaan agar dapat mengajukan perencanaan ke Kabupaten Bantul untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal serta menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial terutama Kemiskinan.

Dalam rangka mewujudkan perencanaan yang baik dan bersinergi, maka Dinas Sosial Kabupaten Bantul perlu merancang perencanaan dan pengendalian serta pelaporan agar dapat di dokumenkan dan menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

C. Tujuan dan Data Pendukung

Dalam sub kegiatan ini, data yang diperlukan adalah terkait perencanaan dan pendanaan, data PMKS serta bagan struktur organisasi sebagai dasar pembuatan laporan- laporan dan dokumen perencanaan.

Data tersebut antara lain :

1. Data PMKS :

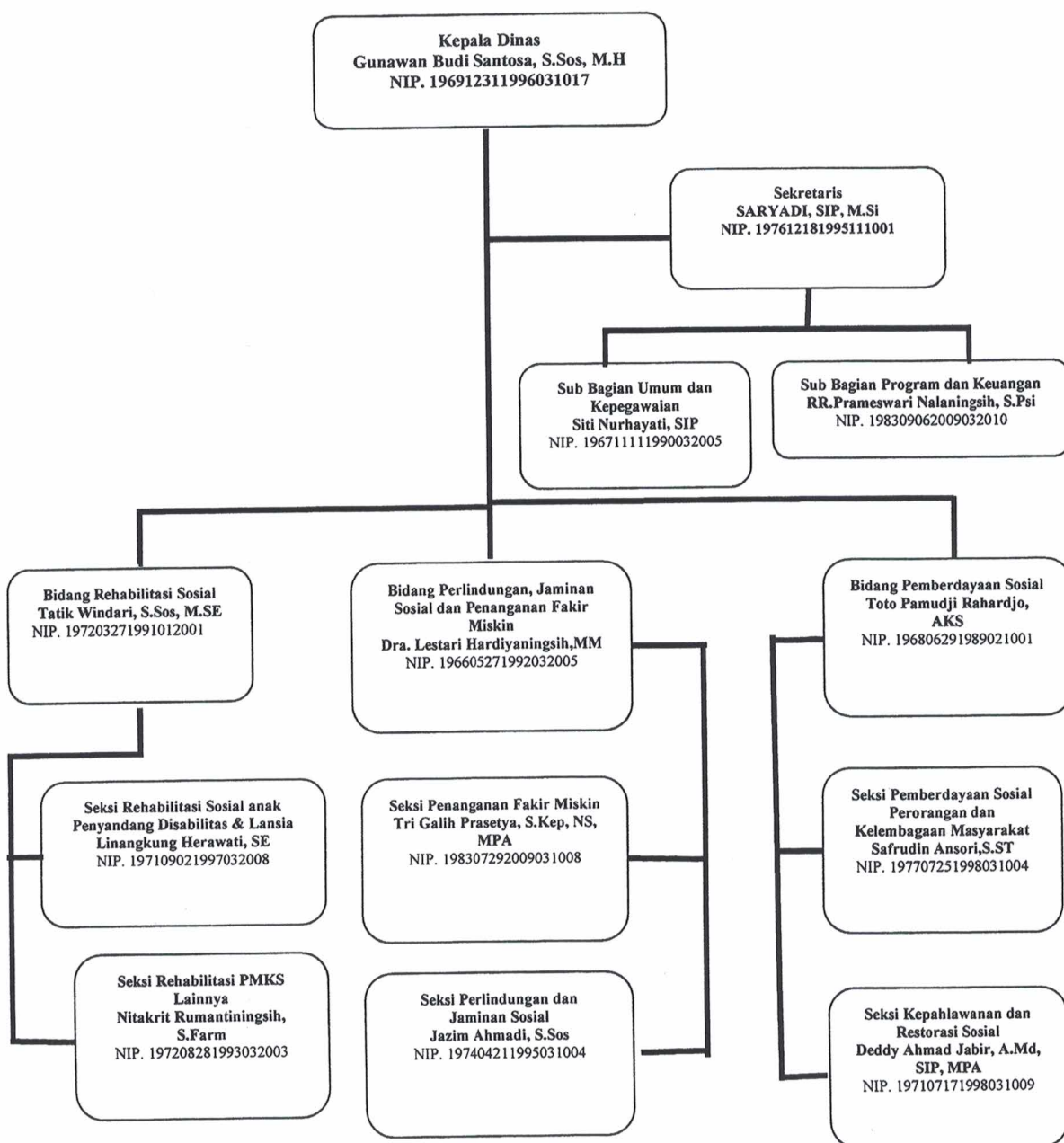
Persebaran Jenis PMKS di Kabupaten/Kota

No.	Jenis PMKS	Jumlah
1	Anak Balita Terlantar	13
2	Anak dengan Kedisabilitas	352
3	Anak jalanan	6
4	AKTK	2
5	Anak Terlantar	1277
6	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan	105
7	Gelandangan keluarga	32
8	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	1198
9	Korban Penyalahgunaan Napza	71

10	Korban Tindak Kekerasan	111
11	Lanjut usia Terlantar	7208
12	Penyandang Disabilitas	5912
13	Pemulung	133
14	Pengemis	21
15	PMBS	49
16	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	2714
17	Tuna Susila	35
	Jumlah PMKS	19257

2. Struktur Organisasi :

Dinas Sosial Kabupaten Bantul



II. Indikator dan Sudut Pandang Pemecahan Masalah

Indikator Sub Kegiatan pada Kerangka Acuan Kegiatan ini adalah adanya laporan perencanaan dan evaluasi dengan target 11.500 lembar. 11.500 lembar tersebut antara lain adalah Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, LKJ perangkat daerah, LKPJ Perangkat Daerah, LPPD, dokumen Perjanjian Kinerja, dokumen DPA, Buku Angkas.

Berdasarkan permasalahan yang dipecahkan antara lain :

1. Aspek lingkungan : dalam membuat proses membuat dokumen perencanaan, data terkait lingkungan sangat dibutuhkan, misal terkait lingkungan yang rentan akan bencana, hal ini akan mempengaruhi perencanaan dan penganggaran yang dilaporkan.
2. Aspek Ekonomi : pengentasan kemiskinan sangat terkait dengan sudut pandang pemecahan masalah ekonomi, sehingga dalam perencanaan untuk kegiatan pengentasan kemiskinan merupakan faktor yang diutamakan dan menjadi skala prioritas sesuai dengan Tema skala prioritas Kabupaten dan DIY. Dalam masa pemulihan *Covid-19* perencanaan 2022 diutamakan untuk pemulihan perekonomian.
3. Aspek Sosial : pada aspek sosial, terkait dengan penanganan kesejahteraan penanganan PMKS dan penataan masyarakat melalui lembaga mitra menjadi tolak ukur yang dilibatkan dalam perencanaan.

III. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah perlu direncanakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan kegiatan di Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

IV. Gambaran Sub Kegiatan / Wujud Konkret

Gambaran kegiatan pada Sub Kegiatan ini adalah pelaksanaan pembuatan dokumen yang membutuhkan rapat koordinasi, pengumpulan dan pengolahan data, pengentrian anggaran, pembuatan laporan.

V. Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

NO	URAIAN	WAKTU
1	Dok. Pra Renstra	Januari s.d Maret
2	Dok. Pra Renja	Maret s.d April
3	Dok. Renstra	April s.d Juli
4	Dok. Renja	Juli
5	Dok. Esakip	Februari
6	Dok LKJ	Januari s.d Maret
7	Dok LKPJ	Januari s.d Maret

no	uraian	bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dok. Pra Renstra												
	Dok. Pra Renja												
	Dok. Renstra												
	Dok. Renja												
	Dok. Esakip												
	Dok LKJ												
	Dok LKPJ												

Waktu untuk pelaksanaan pengerjaan dokumen-dokumen perencanaan dan hasil evaluasi diatas dilaksanakan sesuai jadwal dari TAPD dan Bappeda.

Penganggaran pada sub ini dirincikan untuk pelaksanaan rapat koordinasi pembuatan dokumen tersebut diatas beserta kelengkapannya seperti penggandaan.

VI. Anggaran

Anggaran yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 32.312.622,- (tiga puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).

VII. ORGANISASI / IINSTANSI PELAKSANA

Instansi pelaksana kegiatan ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.



 Kepala,

Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

വികസന-അതിഥി

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022**

- Program** : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Indikator Program** : Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
- Kegiatan** : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Indikator Kegiatan** : Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat daerah
- Sub.Kegiatan** : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

I. INDIKATOR SUB KEGIATAN

Menu Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :

No	Indikator Sub Kegiatan	Target Ouput
1	Laporan data LPPD	1 Dokumen
2	Laporan data SPM	1 Dokumen
3	Penggandaan perencanaan dan dokumen	11.500 lembar

II. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana Anggaran Belanja untuk menu subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

No	Rincian Menu Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	Penggandaan LPPD dan SPM	2.837.750,-	2.927.750,-	90.000,-
2	Penggandaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	3.750.000,-	3.750.000,-	0,-

3	Penggandaan Pendataan urusan sosial dan P3a	4.750.000,-	4.750.000,-	0,-
4	Evaluasi pendataan sosial	56.250,-	56.250,-	0,-
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.550.000,-	12.112.500,-	9.562.500,-
6	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	210.000,-	7.980.000,-	7.770.000,-
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	147,-	736.122,-	735.975,-
	Jumlah Anggaran	14.154.147,-	32.312.622,-	18.158.475,-

Total rencana anggaran subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tahun 2022 sebelum perubahan adalah Rp 14.154.147,- (empat belas juta seratus lima puluh empat seratus empat puluh tujuh rupiah).

Total anggaran SubKegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tahun 2022 setelah perubahan adalah sebesar Rp 32.312.622,- (tiga puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).

III. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja SubKegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tahun 2022 dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.

Kepala,

Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

ꦩꦶꦏꦏꦠꦏꦧꦠꦸꦭꦶꦱꦺꦴꦱꦶꦱꦶꦭ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022
Nomor : 050/07187**

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub. Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Indikator Sub.Kegiatan : Laporan Akuntansi Keuangan, Target 1 dokumen

Latar Belakang

I. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota.
8. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

II. Gambaran Umum

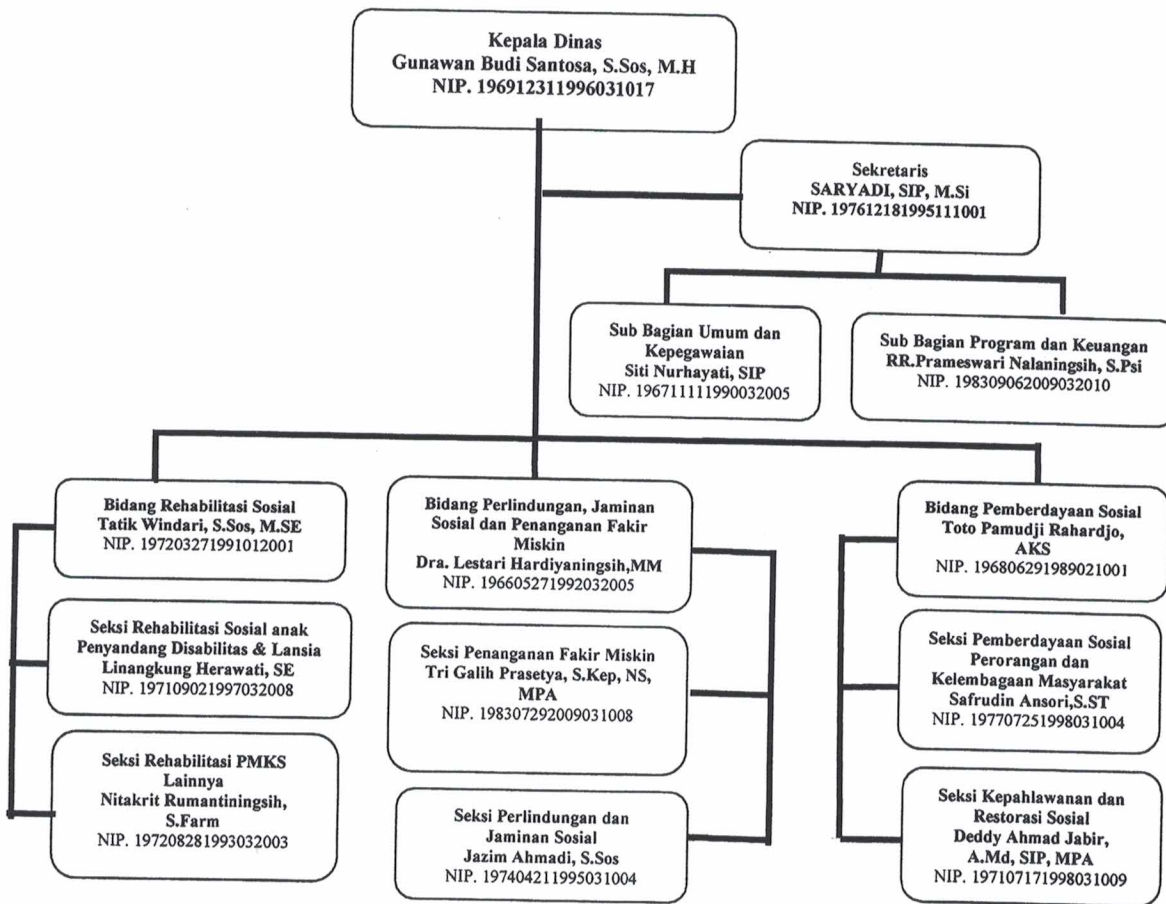
Dalam hal pengelolaan anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul, aspek pertanggungjawaban pengelolaan anggaran merupakan tahapan sangat penting. Pertanggungjawaban memiliki makna yang strategis baik dari aspek ekonomi, pengukuran kinerja, dan perencanaan strategis itu sendiri. penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul merupakan salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu, kejujuran, dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.

III. Data Pendukung

Data dukung untuk rencana kegiatan ini ada adalah :

- Sumber Pendanaan
- Sumber Daya Manusia

- Struktur Organisasi



IV. Masukan

Tertibnya administrasi dalam pengelolaan laporan keuangan Program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bantul tahun 2022

V. Tujuan Kegiatan:

Tujuan kegiatan pada sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam hal ini Laporan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

VI. Gambaran Kegiatan yang akan dilaksanakan

A. Metode Pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dilaksanakan secara swakelola

B. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan:

- a) Persiapan
- b) Pelaksanaan
- c) Evaluasi dan Pelaporan

C. Matrik pelaksanaan kegiatan:

URAIAN	B u l a n											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Persiapan	■	■										
Pelaksanaan Kegiatan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Evaluasi dan Pelaporan											■	■

VII. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan

- Perda APBD
- Perbup Penjabaran APBD

VIII. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pada sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dilaksanakan selama 12 bulan dan bertempat di Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

IX. Biaya yang dibutuhkan

Rencana Anggaran Belanja Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang diajukan adalah Rp. 51.855.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

X. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja untuk sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.



Kepala,

Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

வினாடி அமைச்சு

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022**

- Program** : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Indikator Program** : Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
- Kegiatan** : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Indikator Kegiatan** : Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan
- Sub.Kegiatan** : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

I. INDIKATOR SUB KEGIATAN

Menu Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD :

No	Indikator Sub Kegiatan	Target Ouput
1	Laporan akuntansi keuangan	1 dokumen

II. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana Anggaran Belanja untuk menu subkegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	7.340.000,-	7.340.000,-	0,-
2.	Belanja Alat/Bahan untuk	10.620.000,-	11.932.500,-	1.312.500,-

	Kegiatan Kantor			
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	3.940.000,-	3.940.000,-	0,-
4.	Belanja Makan dan Minum Rapat -Belanja makan dan minum rapat koordinasi pendataan	10.200.000,-	21.952.500,-	11.752.500,-
5.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan -Belanja Makan Minum Lembur	14.400.000,-	4.140.000,-	(10.260.000,-)
6.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan -Belanja transport peserta rapat koordinasi data kapanewon urusan sosial	0,-	2.550.000,-	2.550.000,-
	Jumlah	46.500.000,-	51.855.000,-	5.355.000,-

Total Rencana Anggaran Belanja Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD tahun 2022 sebelum perubahan anggaran adalah sebesar Rp. 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Total Rencana Anggaran Belanja Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD tahun 2022 setelah perubahan anggaran adalah sebesar Rp. 51.855.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

III. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja Subkegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.



Kepala,
Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

ꦩꦶꦏꦏꦸꦫꦤ꧀ꦧꦠꦸꦭꦶꦪꦶꦁꦠꦺꦤ꧀ꦧꦠꦸꦭ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022**
Nomor : 050/07182

Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Indikator Sub Kegiatan	: Laporan Koordiansi dan Pendampingan Perencanaan dan Evaluasi, Target 1 Laporan

I. LATAR BELAKANG

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPMBidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar teknis pelayanan dasara pada standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/ kota.
8. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

B. Gambaran Umum

Dinas Sosial Kabupaten Bantul adalah Perangkat Daerah yang mengusung Tematik Kemiskinan dan memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) dasar Wajib. Dinas Sosial Kabupaten Bantul mendukung IKU Bupati terkait Angka Kemiskinan dan Kriminalitas.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul pengampu SPM pokok dasar wajib, mengusung tematik kemiskinan dimana kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul sebagian besar merupakan bagian dari adanya Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS), mitra kerja dalam menanggulangi kemiskinan dan korban bencana.

Dinas Sosial Kabupaten Bantul menangani urusan sosial. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang banyak dan meningkatnya kasus kekerasan di kabupaten bantul membuat Dinas Sosial Kabupaten Bantul harus menyusun strategi perencanaan agar dapat mengajukan perencanaan ke Kabupaten Bantul untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial terutama Kemiskinan.

Dalam rangka mewujudkan perencanaan yang baik dan bersinergi, maka Dinas Sosial Kabupaten Bantul perlu merancang perencanaan dan pengendalian serta pelaporan agar dapat di dokumentasikan dan menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

C. Tujuan dan Data Pendukung

Dalam sub kegiatan ini, data yang diperlukan adalah terkait perencanaan dan pendanaan, data PMKS serta bagan struktur organisasi sebagai dasar pembuatan laporan- laporan dan dokumen perencanaan.

Data tersebut antara lain :

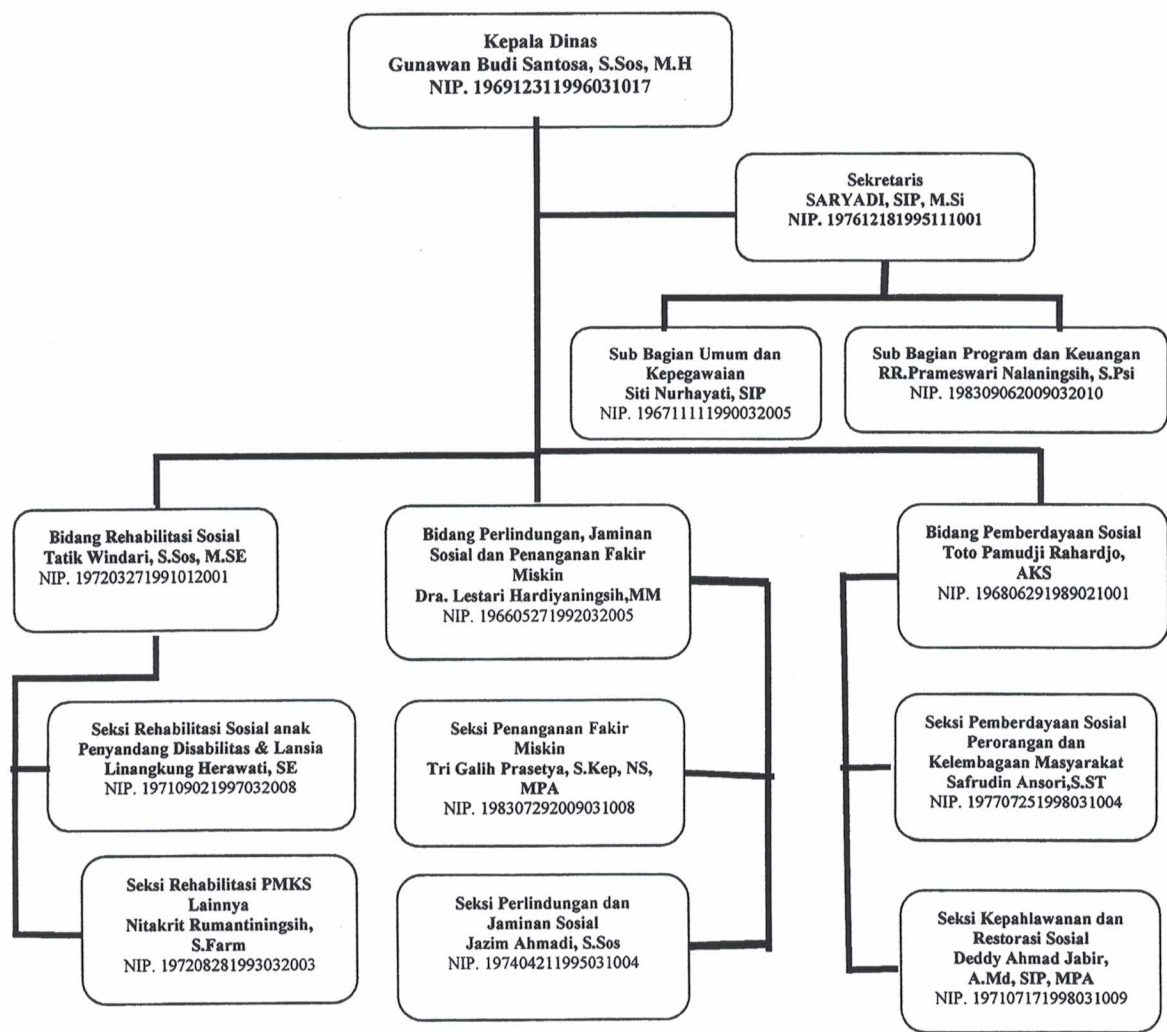
1. Data PMKS :

Persebaran Jenis PMKS di Kabupaten/Kota

No.	Jenis PMKS	Jumlah
1	Anak Balita Terlantar	13
2	Anak dengan Kedisabilitas	352
3	Anak jalanan	6
4	AKTK	2

5	Anak Terlantar	1277
6	Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakatan	105
7	Gelandangan keluarga	32
8	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	1198
9	Korban Penyalahgunaan Napza	71
10	Korban Tindak Kekerasan	111
11	Lanjut usia Terlantar	7208
12	Penyandang Disabilitas	5912
13	Pemulung	133
14	Pengemis	21
15	PMBS	49
16	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	2714
17	Tuna Susila	35
	Jumlah PMKS	19257

2. Struktur Organisasi :
Dinas Sosial Kabupaten Bantul



II. Indikator dan Sudut Pandang Pemecahan Masalah

Indikator Sub Kegiatan pada Kerangka Acuan Kegiatan ini adalah adanya laporan perencanaan dan evaluasi dengan target 1 laporan. 1 laporan tersebut antara lain adalah laporan pelaksanaan Pendampingan Perencanaan dan Evaluasi. Berdasarkan permasalahan yang dipecahkan antara lain :

1. Aspek lingkungan : dalam membuat proses membuat dokumen perencanaan, data terkait lingkungan sangat dibutuhkan, missal terkait lingkungan yang rentan akan bencana, hal ini akan mempengaruhi perencanaan dan penganggaran yang dilaporkan.
2. Aspek Ekonomi : pengentasan kemiskinan sangat terkait dengan sudut pandang pemecahan masalah ekonomi, sehingga dalam perencanaan untuk kegiatan pengentasan kemiskinan merupakan faktor yang diutamakan dan menjadi skala prioritas sesuai dengan Tema skala prioritas Kabupaten dan DIY. Dalam masa pemulihan *Covid-19* perencanaan 2022 diutamakan untuk pemulihan perekonomian.
3. Aspek Sosial : pada aspek sosial, terkait dengan penanganan kesejahteraan penanganan PMKS dan penataan masyarakat melalui lembaga mitra menjadi tolak ukur yang dilibatkan dalam perencanaan.

III. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD perlu direncanakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan kegiatan di Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

IV. Gambaran Sub Kegiatan / Wujud Konkret

Gambaran kegiatan pada Sub Kegiatan ini adalah pelaksanaan pembuatan laporan yang membutuhkan rapat koordinasi, pengumpulan dan pengolahan data, pengentrian anggaran, pembuatan laporan.

V. Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

NO	URAIAN	WAKTU
1	Dok. Pra Renstra	Januari s.d Maret
2	Dok. Pra Renja	Maret s.d April
3	Dok. Renstra	April s.d Juli
4	Dok. Renja	Juli
5	Dok. Esakip	Februari
6	Dok LKJ	Januari s.d Maret
7	Dok LKPJ	Januari s.d Maret

no	uraian	bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dok. Pra Renstra												
2	Dok. Pra Renja												
3	Dok. Renstra												
4	Dok. Renja												
5	Dok. Esakip												
6	Dok LKJ												
7	Dok LKPJ												

Waktu untuk pelaksanaan pengerjaan dokumen-dokumen perencanaan dan hasil evaluasi diatas dilaksanakan sesuai jadwal dari TAPD dan Bappeda.

Penganggaran pada sub ini dirincikan untuk pelaksanaan rapat koordinasi pembuatan dokumen tersebut diatas beserta kelengkapannya seperti makan minum rapat.

VI. Anggaran

Anggaran yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar

Rp. 207.828.250,- (dua ratus tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

VII. ORGANISASI / IINSTANSI PELAKSANA

Instansi pelaksana kegiatan ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.



Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

വികസനം അഭിവൃദ്ധം

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022**

- Program** : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Indikator Program** : Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
- Kegiatan** : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Indikator Kegiatan** : Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah
- Sub.Kegiatan** : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

I. INDIKATOR SUB KEGIATAN

Menu Sub Kegiatan :

No	Indikator Sub Kegiatan	Target Ouput
1	Honor tim pendataan kapanewon	17 tim kapanewon
2	Laporan koordiansi dan pendampingan perencanaan dan evaluasi	1 laporan

II. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana Anggaran Belanja untuk menu subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD berdasarkan RKA adalah sebagai berikut :

No	Rincian Menu Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.750.000,-	8.190.750,-	4.440.750,-
2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.557.500,-	30.657.500,-	5.100.000,-

	-Kegiatan Koordinasi			
3	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	68.190.000,-	95.280.000,-	27.090.000,-
4	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.500.000,-	1.500.000,-	(1.000.000,-)
5	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum -Honor Petugas Pendataan	0,-	63.200.000,-	63.200.000,-
6	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.000.000,-	9.000.000,-	4.000.000,-
	Jumlah anggaran	104.997.500,-	207.828.250,-	102.830.750,-

Total rencana anggaran subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebelum perubahan adalah Rp 104.997.500,- (seratus empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Total anggaran subkegiatan koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tahun 2022 setelah perubahan adalah sebesar Rp 207.828.250,- (dua ratus tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.



Kepala,
Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

ꦩꦶꦏꦏꦠꦏꦧꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦶꦱꦺꦴꦱꦶꦱꦶꦭ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022
Nomor : 050/07186**

- Program** : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan** : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Sub.Kegiatan** : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Indikator Kegiatan** : Laporan Keuangan Realisasi Akhir, Target 1 Dokumen

Latar Belakang

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota.
8. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

B. Gambaran Umum

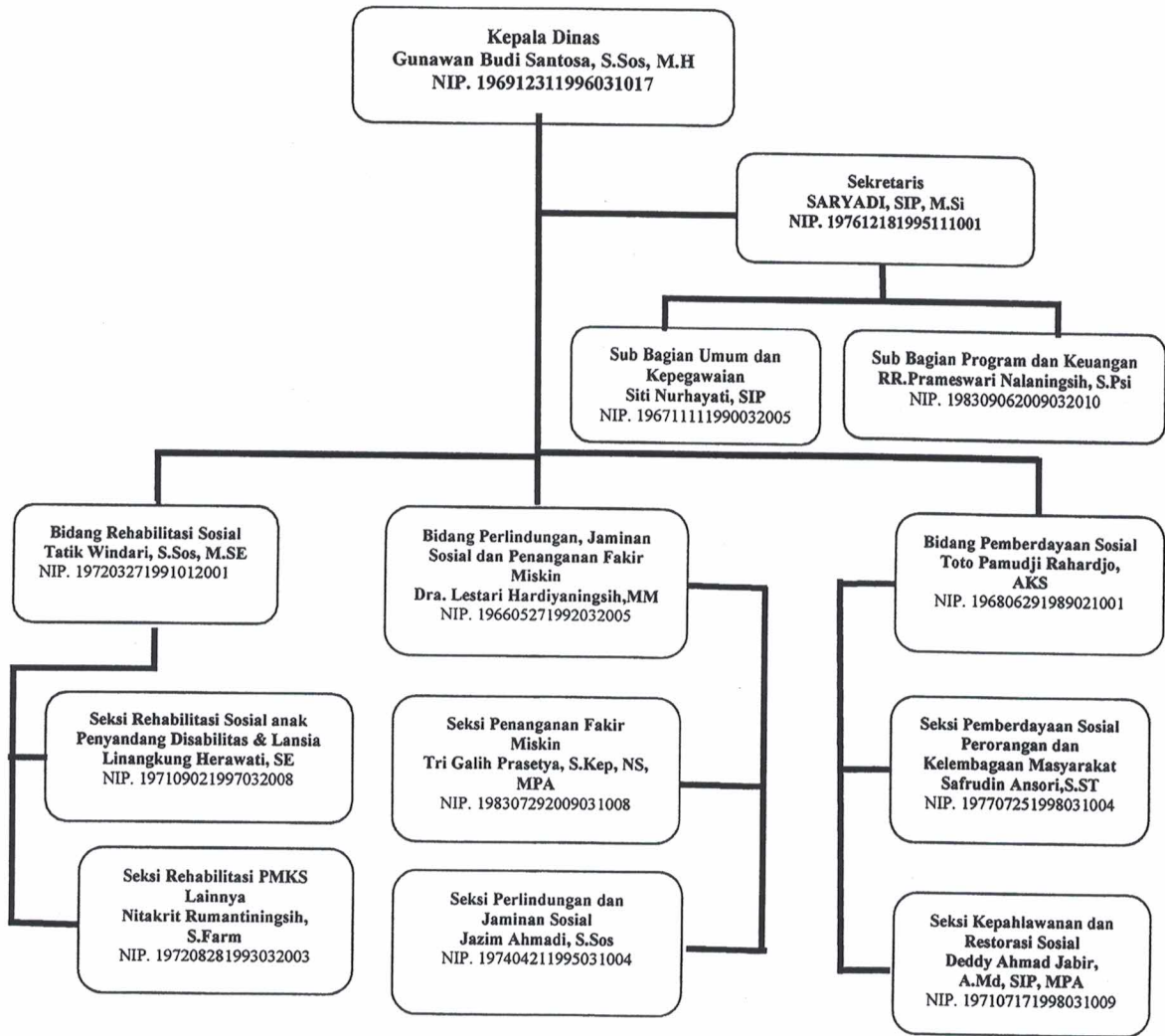
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD selain untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan, juga sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, berdasarkan aturan perundang – undangan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan, dan sebagai representasi dari seluruh komponen kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam satu tahun anggaran serta merupakan siklus pengelolaan anggaran, sehingga dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan anggaran itu sendiri sekaligus merupakan pertanggungjawaban sebagai pengguna anggaran. Dinas Sosial Kabupaten Bantul mempunyai kewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja dan upaya – upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode anggaran.

C. Data Pendukung

Data dukung untuk rencana kegiatan ini ada adalah :

- Sumber Pendanaan
- Sumber Daya Manusia

- Struktur Organisasi



D. Masukan

Tertibnya administrasi pengelolaan laporan keuangan dan barang Program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bantul tahun 2022.

E. Tujuan Kegiatan:

Tujuan kegiatan pada sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul bertujuan agar tertib administrasi dalam tata kelola keuangan daerah serta melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan.

F. Gambaran Kegiatan yang akan dilaksanakan

- a) Metode Pelaksanaan sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dilaksanakan secara swakelola
- b) Tahapan Pelaksanaan Kegiatan:
 - 1. Persiapan
 - 2. Pelaksanaan
 - 3. Evaluasi dan Pelaporan
- c) Matrik pelaksanaan kegiatan:

URAIAN	B u l a n											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Persiapan	■	■	■									
Pelaksanaan Kegiatan				■	■	■	■	■	■	■	■	■
Evaluasi dan Pelaporan											■	■

G. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan

- Perda APBD
- Perbup Penjabaran APBD

H. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pada sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dilaksanakan selama 12 bulan dan bertempat di Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

I. Biaya yang dibutuhkan

Biaya yang dibutuhkan untuk Subkegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD ini adalah Rp. 92.213.632,- (Sembilan puluh dua juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).

J. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja untuk sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

Kepala,



Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

ꦩꦶꦏꦏꦠꦏꦧꦠꦸꦭꦶꦱꦱꦶꦱꦶꦭ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022**

- Program** : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Indikator Program** : Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
- Kegiatan** : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Indikator Kegiatan** : Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan
- Sub Kegiatan** : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

I. INDIKATOR SUB KEGIATAN

Menu Sub Kegiatan :

No	Indikator Sub Kegiatan	Target Ouput
1	Laporan keuangan realisasi akhir	1 dokumen
2	Pembukuan aset dan perbendaharaan	1 dokumen

II. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana Anggaran Belanja untuk menu kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD adalah sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Belanja Alat Tulis Kantor	5.897.950,-	5.897.950,-	0,-
2	Belanja Alat/Bahan untuk	19.215.250,-	20.080.250,-	865.000,-

	Kegiatan Kantor -Belanja penggandaan			
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Belanja Bahan Komputer	2.490.000,-	2.490.000,-	0
4	Belanja Makan dan Minum Rapat	11.900.000,-	14.875.000,-	2.975.000,-
5	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan -Belanja Makan Minum Lembur	5.760.000,-	1.620.000,-	(4.140.000,-)
6	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	48.172.032,-	47.250.432,-	(921.600,-)
	Jumlah	93.435.232,-	92.213.632,-	(1.221.600,-)

Total Rencana Anggaran Belanja Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD tahun 2022 sebelum perubahan anggaran adalah sebesar Rp. 93.435.232,- (Sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).

Total Rencana Anggaran Belanja Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD tahun 2022 setelah perubahan anggaran adalah sebesar Rp. 92.213.632,- (Sembilan puluh dua juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).

III. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.

Kepala,



Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

विहताम आसिवात्पु

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022**
Nomor: 050/07185

- Program** : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan** : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Sub. Kegiatan** : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Indikator Sub. Kegiatan** : Laporan keuangan triwulan, Target 4 dokumen

Latar Belakang

I. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota.
8. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

II. Gambaran Umum

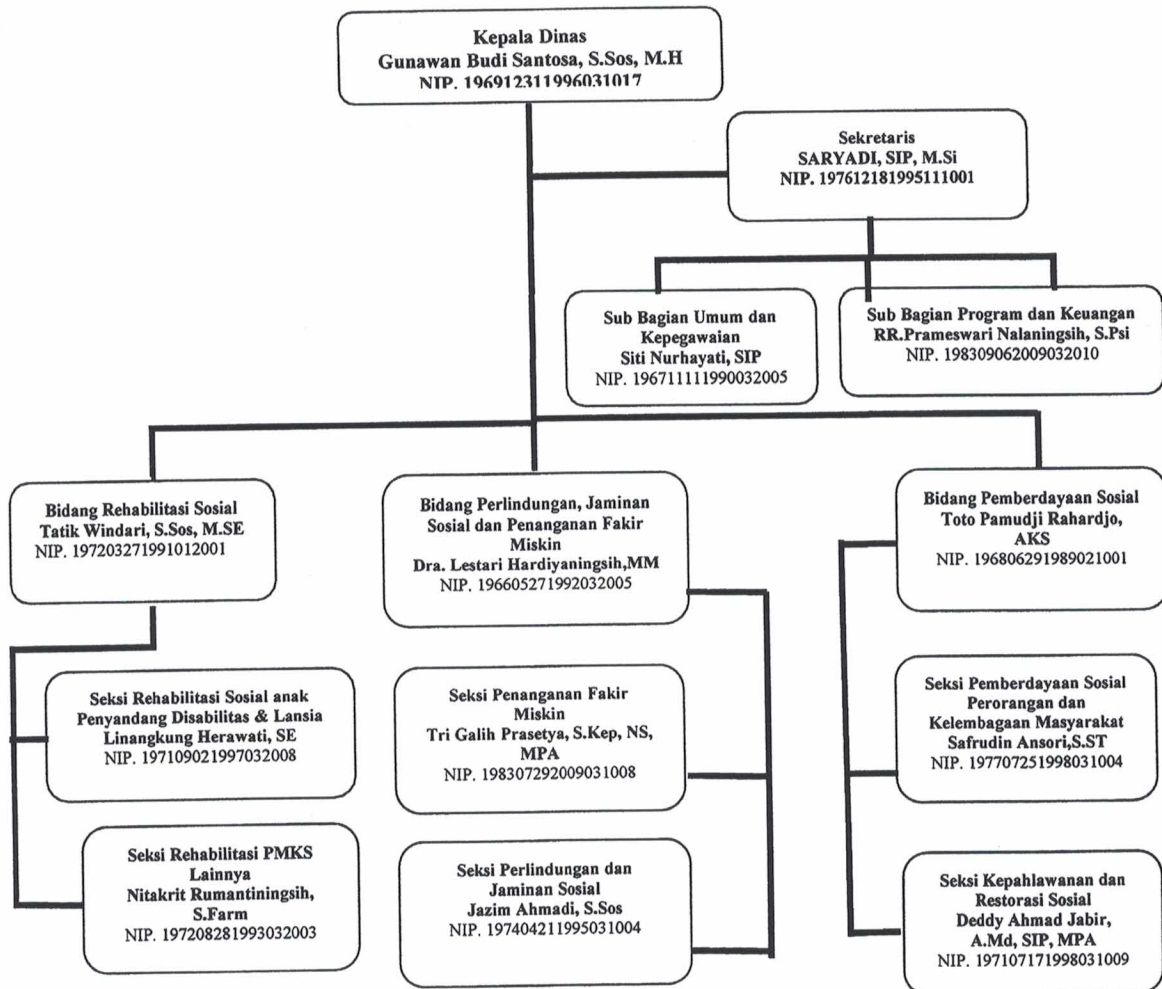
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD selain untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan, juga sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, berdasarkan aturan perundang – undangan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan, dan sebagai representasi dari seluruh komponen kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam satu bulan/triwulan/semester anggaran serta merupakan siklus pengelolaan anggaran, sehingga dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan anggaran itu sendiri sekaligus merupakan pertanggungjawaban sebagai pengguna anggaran. Dinas Sosial Kabupaten Bantul mempunyai kewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja dan upaya – upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode anggaran.

III. Data Pendukung

Data dukung untuk rencana kegiatan ini ada adalah :

- Sumber Pendanaan
- Sumber Daya Manusia

- Struktur Organisasi



IV. Masukan

Tertibnya administrasi pengelolaan laporan keuangan dan barang Program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bantul tahun 2022

V. Tujuan Kegiatan:

Tujuan kegiatan pada sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul bertujuan agar tertib administrasi dalam tata kelola keuangan daerah serta melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan.

VI. Gambaran Kegiatan yang akan dilaksanakan

1. Metode Pelaksanaan sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dilaksanakan secara swakelola.
2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan:
 - a) Persiapan
 - b) Pelaksanaan
 - c) Evaluasi dan Pelaporan
3. Matrik pelaksanaan kegiatan:

URAIAN	B u l a n											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Persiapan	■	■	■									
Pelaksanaan Kegiatan				■	■	■	■	■	■	■	■	■
Evaluasi dan Pelaporan											■	■

VII. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan

- Perda APBD
- Perbup Penjabaran APBD

VIII. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pada subkegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dilaksanakan selama 12 bulan dan bertempat di Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

IX. Biaya yang dibutuhkan

Biaya yang dibutuhkan untuk Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

X. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja untuk sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

Kepala,


Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

विहगल अडविलगुगु

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022**

- Program** : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Indikator Program** : Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
- Kegiatan** : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Indikator Kegiatan** : Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan
- Sub.Kegiatan** : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

I. INDIKATOR SUB KEGIATAN

Menu Sub Kegiatan :

No	Indikator Sub Kegiatan	Target Ouput
1	Dokumen keuangan per triwulan	4 dokumen

II. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana Anggaran Belanja untuk menu Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat	2.968.000,-	2.968.000,-	0,-

	Tulis Kantor			
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak/penggandaan	17.422.000,-	18.082.000,-	660.000,-
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Tinta cartridge	5.670.000,-	5.670.000,-	
4.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.300.000,-	20.400.000,-	5.100.000,-
6.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan - Makan Minum Lembur	8.640.000,-	2.880.000,-	(5.760.000,-)
	Jumlah	50.000.000,-	50.000.000,-	0,-

Total Rencana Anggaran Belanja Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD tahun 2022 sebelum perubahan anggaran adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Total Rencana Anggaran Belanja Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD tahun 2022 setelah perubahan anggaran adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

III. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.

Kepala,



Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

வினாடி அமைச்சு

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
ANGGARAN PERUBAHAN 2022
Nomor: 050/07188**

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub. Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Indikator Sub.Kegiatan : Honorarium Pengelola Keuangan dan Barang, Target 180 ob

Latar Belakang

I. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota.

8. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

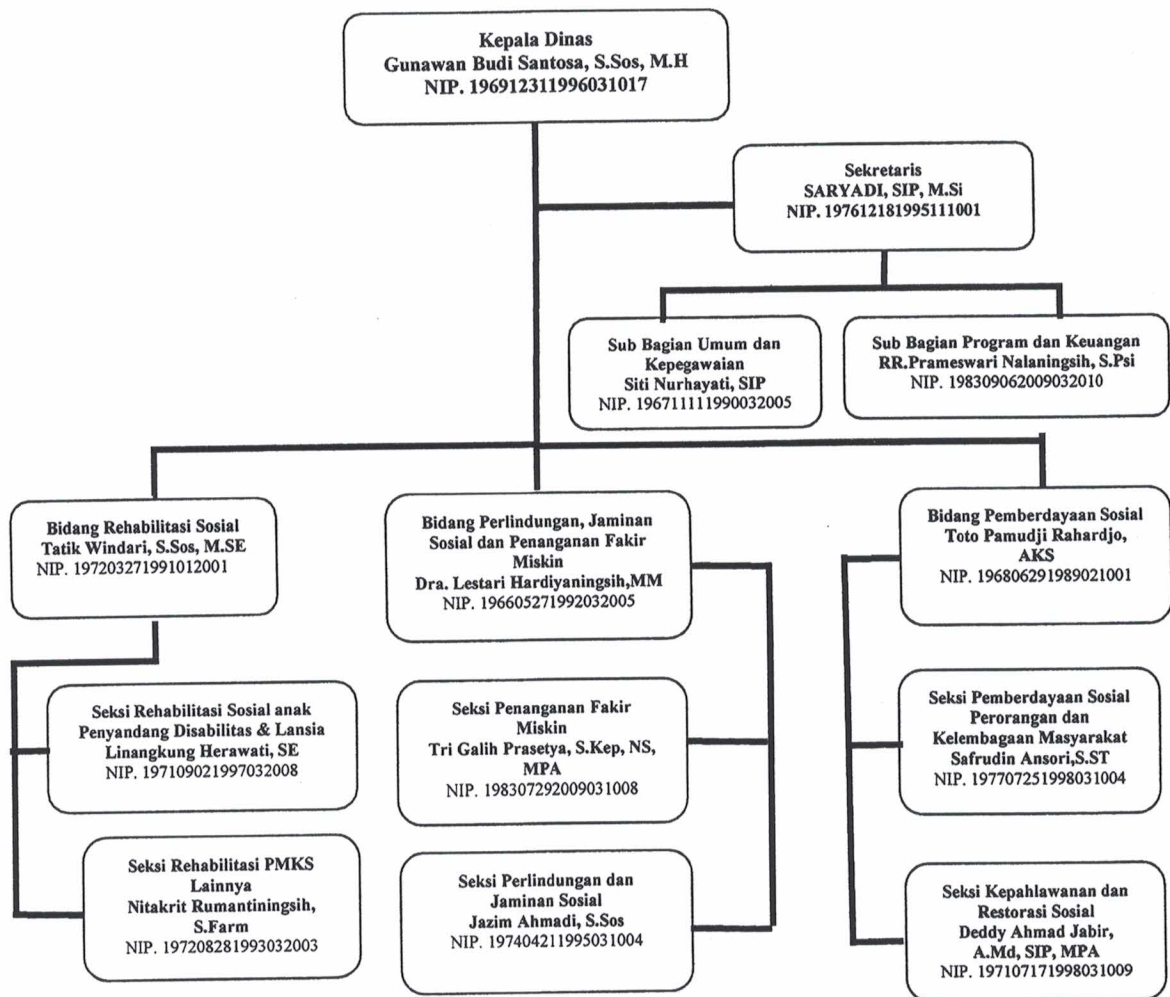
II. Gambaran Umum

Pemberian honorarium pengelola keuangan diberikan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati dan Surat Keputusan Pengguna Anggaran dengan besaran sesuai standar biaya yang telah ditetapkan. Pemberian honorarium ini diberikan atas dasar pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan kepada pegawai yang bersangkutan.

III. Data Pendukung

Data dukung untuk rencana kegiatan ini ada adalah :

- Sumber Pendanaan
- Sumber Daya Manusia
- Struktur Organisasi



IV. Masukan

Peningkatan profesionalitas kinerja pejabat administrasi keuangan di kantor.

V. Tujuan Kegiatan:

Adapun tujuan kegiatan pada sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN adalah menyediakan honorarium bagi pengelola keuangan dan barang di Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

VI. Gambaran Kegiatan yang akan dilaksanakan

- a) Metode Pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dilaksanakan secara swakelola
- b) Tahapan Pelaksanaan Kegiatan:
 1. Persiapan
 2. Pelaksanaan
 3. Evaluasi dan Pelaporan
- c) Matrik pelaksanaan kegiatan:

URAIAN	B u l a n											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Persiapan	xx	xx										
Pelaksanaan Kegiatan	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
Evaluasi dan Pelaporan											xx	xx

VII. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan

- Perda APBD
- Perbup Penjabaran APBD

VIII. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pada sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dilaksanakan selama 12 bulan dan bertempat di Dinas Sosial Kabupaten Bantul.


IX. Biaya yang dibutuhkan

Biaya yang dibutuhkan untuk subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ini adalah Rp. 132.960.000,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

X. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja pada sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

Kepala,



Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS SOSIAL

വികസന സമിതി

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022**

- Program** : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Indikator Program** : Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
- Kegiatan** : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Indikator Kegiatan** : Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan
- Sub.Kegiatan** : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

I. INDIKATOR SUB KEGIATAN

Menu Sub Kegiatan :

No	Indikator Sub Kegiatan	Target Ouput
1	Honorarium pengelola keuangan dan barang	180 ob

II. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana Anggaran Belanja untuk menu Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN adalah sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.	Honor Bendahara Pengeluaran	9.600.000,-	9.600.000,-	0,-
2.	Honor Pejabat Penatausahaan	12.000.000,-	12.000.000,-	0,-

	Keuangan			
3.	Honor Pejabat Pengguna Anggaran	15.600.000,-	15.600.000,-	0,-
4.	Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran	27.000.000,-	18.000.000,-	(9.000.000,-)
5.	Honor Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Barang	21.600.000,-	21.600.000,-	0,-
6.	Honor Pembantu Pengurus Barang	3.480.000,-	1.800.000,-	(1.680.000,-)
7.	Honor Pengelola Urusan Kepegawaian	2.100.000,-	2.100.000,-	0,-
8.	Honor Pengurus Barang	4.320.000,-	2.160.000,-	(2.160.000,-)
9.	Honor Pengurus Gaji	2.100.000,-	2.100.000,-	
10.	Honor PPTK Bidang Pemberdayaan Sosial	13.200.000,-	9.600.000,-	(3.600.000,-)
11.	Honor PPTK Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	0,-	12.000.000,-	12.000.000,-
		13.200.000,-	0,-	(13.200.000,-)
12.	Honor PPTK Bidang Rehabilitasi Sosial	13.200.000,-	13.200.000,-	0,-
13.	Honor PPTK Sekretariat	0,-	13.200.000,-	13.200.000,-
	Jumlah	137.400.000,-	132.960.000,-	(4.440.000,-)

Total Rencana Anggaran Belanja Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN tahun 2022 sebelum perubahan anggaran adalah sebesar Rp. 137.400.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

Total Rencana Anggaran Belanja Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN tahun 2022 sebelum perubahan anggaran adalah sebesar Rp. 132.960.000,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

III. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.

Kepala,



Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

ꦩꦶꦏꦏꦺꦤ꧀ꦧꦠꦸꦭꦶꦪꦱꦺꦴꦩꦶꦱꦺꦴꦱꦶꦭ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022
Nomor : 050/07183**

Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator SubKegiatan	: Dokumen Perencanaan dan Evaluasi, Target 4 dokumen

I. LATAR BELAKANG

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPMbidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar teknis pelayanan dasara pada standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/Kota.
8. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

B. Gambaran Umum

Dinas Sosial Kabupaten Bantul adalah Perangkat Daerah yang mengusung Tematik Kemiskinan dan memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) dasar Wajib. Dinas Sosial Kabupaten Bantul mendukung IKU Bupati terkait Angka Kemiskinan dan Kriminalitas.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul pengampu SPM pokok dasar wajib, mengusung tematik kemiskinan dimana kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul sebagian besar merupakan bagian dari adanya Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS), mitra kerja dalam menanggulangi kemiskinan dan korban bencana.

Dinas Sosial Kabupaten Bantul menangani urusan sosial. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang banyak di kabupaten bantul membuat Dinas Sosial Kabupaten Bantul harus menyusun strategi perencanaan agar dapat mengajukan perencanaan ke Kabupaten Bantul untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal serta menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial terutama Kemiskinan.

Dalam rangka mewujudkan perencanaan yang baik dan bersinergi, maka Dinas Sosial Kabupaten Bantul perlu merancang perencanaan dan pengendalian serta pelaporan agar dapat di dokumenkan dan menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

C. Tujuan dan Data Pendukung

Dalam sub kegiatan ini, data yang diperlukan adalah terkait perencanaan dan pendanaan, data PMKS serta bagan struktur organisasi sebagai dasar pembuatan laporan- laporan dan dokumen perencanaan.

Data tersebut antara lain :

1. Data PMKS :

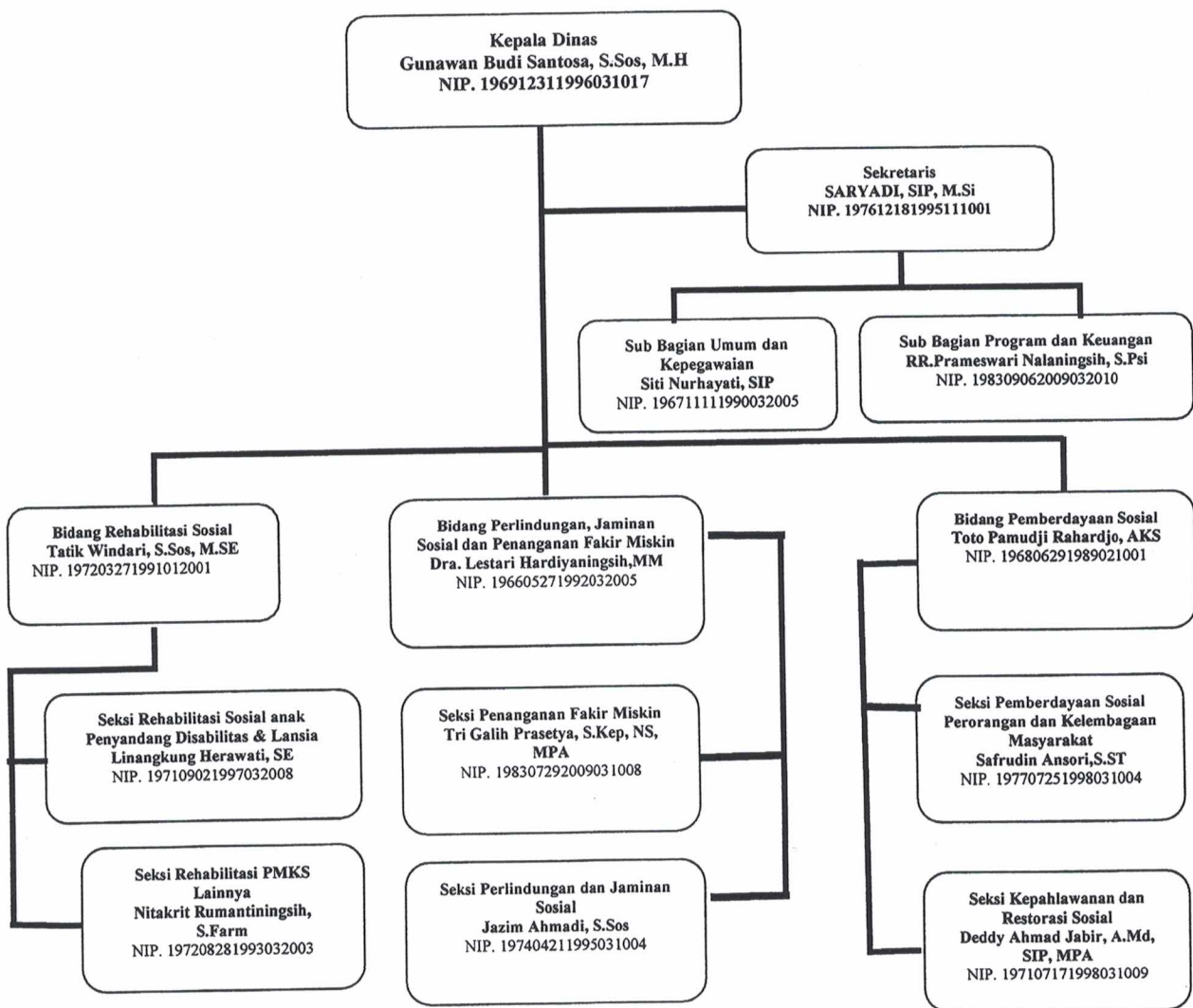
Persebaran Jenis PMKS di Kabupaten/Kota

No.	Jenis PMKS	Jumlah
1	Anak Balita Terlantar	13
2	Anak dengan Kedisabilitas	352
3	Anak jalanan	6
4	AKTK	2
5	Anak Terlantar	1277
6	Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakat	105
7	Gelandangan keluarga	32
8	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	1198

9	Korban Penyalahgunaan Napza	71
10	Korban Tindak Kekerasan	111
11	Lanjut usia Terlantar	7208
12	Penyandang Disabilitas	5912
13	Pemulung	133
14	Pengemis	21
15	PMBS	49
16	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	2714
17	Tuna Susila	35
	Jumlah PMKS	19257

2. Struktur Organisasi :

Dinas Sosial Kabupaten Bantul:



II. Indikator dan Sudut Pandang Pemecahan Masalah

Indikator Sub Kegiatan pada Kerangka Acuan Kegiatan ini adalah adanya laporan perencanaan dan evaluasi dengan target 4 dokumen. 4 dokumen tersebut antara lain adalah Rensta Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, LKJ perangkat daerah, LKPJ Perangkat Daerah, LPPD, dokumen Perjanjian Kinerja, dokumen DPA, Buku Angkas.

Berdasarkan permasalahan yang dipecahkan antara lain :

1. Aspek lingkungan : dalam membuat proses membuat dokumen perencanaan, data terkait lingkungan sangat dibutuhkan, misal terkait lingkungan yang rentan akan bencana, hal ini akan mempengaruhi perencanaan dan penganggaran yang dilaporkan.
2. Aspek Ekonomi : pengentasan kemiskinan sangat terkait dengan sudut pandang pemecahan masalah ekonomi, sehingga dalam perencanaan untuk kegiatan pengentasan kemiskinan merupakan factor yang diutamakan dan menjadi skala prioritas sesuai dengan Tema skala prioritas Kabupaten dan DIY. Dalam masa pemulihan *Covid-19* perencanaan 2022 diutamakan untuk pemulihan perekonomian.
3. Aspek Sosial : pada aspek sosial, terkait dengan penanganan kesejahteraan penanganan PMKS dan penataan masyarakat melalui lembaga mitra menjadi tolak ukur yang dilibatkan dalam perencanaan.

III. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah perlu direncanakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan kegiatan di Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

IV. Gambaran Sub Kegiatan / Wujud Konkret

Gambaran kegiatan pada Sub Kegiatan ini adalah pelaksanaan pembuatan dokumen yang membutuhkan Rapat koordinasi, pengumpulan dan pengolahan data, Pengentrian anggaran, pembuatan laporan.

V. Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

NO	URAIAN	WAKTU
1	Dok. Pra Renstra	Januari s.d Maret
2	Dok. Pra Renja	Maret s.d April
3	Dok. Renstra	April s.d Juli
4	Dok. Renja	Juli
5	Dok. Esakip	Februari
6	Dok LKJ	Januari s.d Maret
7	Dok LKPJ	Januari s.d Maret

no	uraian	bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dok. Pra Renstra	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
2	Dok. Pra Renja	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
3	Dok. Renstra	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
4	Dok. Renja	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
5	Dok. Esakip	■	■	■									
6	Dok LKJ	■	■	■									
7	Dok LKPJ	■	■	■									

Waktu Untuk pelaksanaan pengerjaan dokumen-dokumen perencanaan dan hasil evaluasi diatas dilaksanakan sesuai jadwal dari TAPD dan Bappeda.

Penganggaran pada sub ini dirincikan untuk pelaksanaan rapat koordinasi pembuatan dokumen tersebut diatas beserta kelengkapannya seperti ATK.

VI. Anggaran

Anggaran yang direncanakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.88.991.148,- (Delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh delapan).

VII. ORGANISASI / IINSTANSI PELAKSANA

Instansi pelaksana kegiatan ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

VIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.



Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS SOSIAL

வினாடி அமைச்சு

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB) ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022

- Program** : Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Indikator Program** : Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP)
- Kegiatan** : Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Indikator Kegiatan** : Capaian Kinerja Perencanaan dan
Evaluasi Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan** : Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

I. INDIKATOR SUB KEGIATAN

Menu Sub Kegiatan :

No	Indikator Sub Kegiatan	Target Ouput
1	Dokumen perencanaan dan evaluasi	4 dokumen
2	Update data urusan sosial terintegrasi	1 dokumen

II. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana Anggaran Belanja untuk menu kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

No	Rincian Menu Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	Belanja Alat/Bahan untuk	17.654.890,-	17.654.700,-	(190,-)

	Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			
2	Belanja Jasa Tenaga Administrasi -Belanja Jasa Kantor -Iuran Jaminan Kesehatan	72.258.048,-	71.336.448,-	(921.600,-)
	Jumlah Anggaran	89.912.938,-	88.991.148,-	(921.790,-)

Total rencana anggaran subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tahun 2022 sebelum perubahan adalah sebesar Rp 89.912.938,- (Delapan puluh sembilan juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan).

Total rencana anggaran subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tahun 2022 setelah perubahan adalah sebesar Rp 88.991.148,- (Delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh delapan).

III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan.

Kepala,


Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

ꦩꦶꦏꦏꦠꦏꦧꦠꦸꦭꦏꦧ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022**
Nomor : 050/07184

Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub. Kegiatan	: Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Indikator Sub.Kegiatan	: Prognosis Keuangan, Target 1 dokumen

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota.
8. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

b. Gambaran Umum

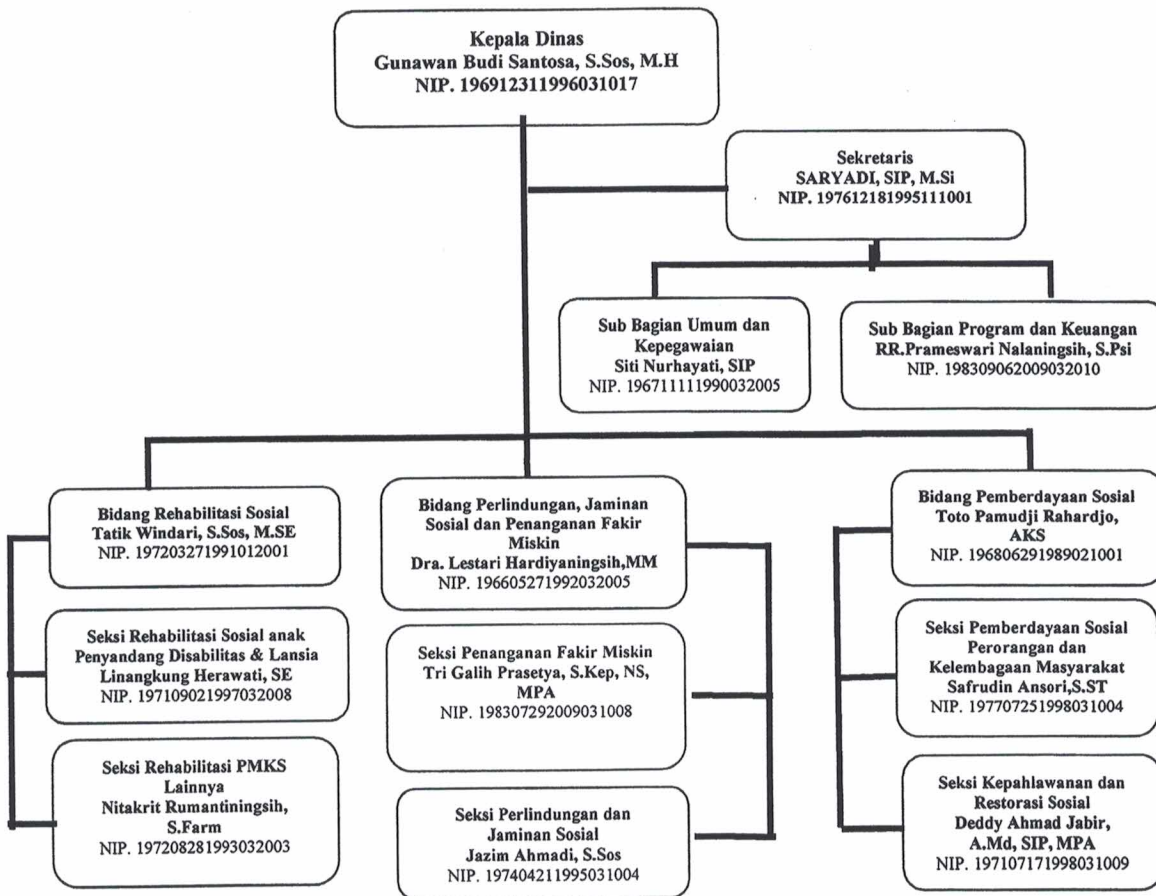
Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran selain untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul selama satu semester, juga sebagai informasi tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, berdasarkan aturan perundang – undangan. Laporan prognosis realisasi anggaran keuangan menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam periode Januari-Juni pada tahun anggaran berkenaan.

c. Data Pendukung

Data dukung untuk rencana kegiatan ini ada adalah :

- Sumber Pendanaan
- Sumber Daya Manusia

- Struktur Organisasi



II. Masukan

Tertibnya administrasi dalam pengelolaan laporan keuangan Program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bantul tahun 2022.

III. Tujuan Kegiatan:

Tujuan kegiatan pada sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam hal ini Laporan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 adalah dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam pengelolaan pemerintah yang baik (Good Governance).

IV. Gambaran Kegiatan yang akan dilaksanakan

a. Metode Pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dilaksanakan secara swakelola

b. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan:

1. Persiapan
2. Pelaksanaan
3. Evaluasi dan Pelaporan

c. Matrik pelaksanaan kegiatan:

URAIAN	B u l a n											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Persiapan	■	■										
Pelaksanaan Kegiatan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Evaluasi dan Pelaporan											■	■

V. Dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan

- Perda APBD
- Perbup Penjabaran APBD

VI. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pada sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dilaksanakan selama 12 bulan dan bertempat di Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

VII. Biaya yang dibutuhkan

Anggaran yang direncanakan untuk subkegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

VIII. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja untuk sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

Kepala,



Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

विहगल अडललतलतल

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Tlrenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022**

- Program** : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Program : Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator Kegiatan : Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan
Sub Kegiatan : Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

I. INDIKATOR SUB KEGIATAN

Menu Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran:

No	Indikator Sub Kegiatan	Target Ouput
1	Prognosis Keuangan	1 dokumen

II. RENCANA ANGGARAN BELANJA

Rencana Anggaran Belanja untuk menu Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut :

No	Rincian Menu Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.513.000,-	3.513.000,-	0,-
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan	11.162.000,-	11.237.000,-	75.000,-

	Cetak			
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.200.000,-	5.700.000,-	500.000,-
4.	Belanja Makan dan Minum Rapat -Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi	6.375.000,-	6.800.000,-	425.000,-
5.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan -Belanja Makan Minum Lembur	3.750.000,-	750.000,-	(3.000.000,-)
	Jumlah	30.000.000,-	28.000.000,-	(2.000.000,-)

Total Rencana Anggaran Belanja Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tahun 2022 setelah perubahan adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Total Rencana Anggaran Belanja Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tahun 2022 sesudah perubahan adalah sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

III. PENUTUP

Demikian Rencana Anggaran Belanja Subkegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dibuat agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam melaksanakannya.



Kepala,
Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 196912311996031017